

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA CANTING
MAS PUNCAK DI POWONO
KABUPATEN KULON PROGO**



Disusun Oleh:

SUATMAJI

20110520080

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
OBJEK WISATA CANTING MAS PUNCAK DIPOWONO
KABUPATEN KULON PROGO**

Oleh:
SUATMAJI
20110520080

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

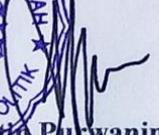
Dosen Pembimbing


Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.
NIDN: 0501057701

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**


Yatin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA CANTING MAS PUNCAK DIPOWONO KABUPATEN KULON PROGO¹

Disusun oleh :

SUATMAJI

20110520080

SINOPSIS

Hasil dari penelitian di lapangan, Kepariwisataan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor untuk menunjang infrastruktur, promosi dan konektivitas. Dalam hal ini yang memiliki tugas dan fungsi adalah pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pemasaran di bidang wisata adalah Dinas Pariwisata. Yang dimana peneliti ingin melihat bagaimana peran dari dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten kulon Progo.

Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini terdiri dari 2 rumusan masalah yaitu bagaimana peran Dinas Pariwisata terhadap pengembangan dari potensi Canting Mas Puncak Dipowono yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan Apa saja yang di lakukan Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Canting Mas Puncak Dipowono titik fokus peran dinas pariwisata Kabupaten Kulonprogo adalah bagaimana peran pengaturannya, peran pemberdayaanya dan peran pelayanannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mendapatkan hasil Dalam Peran Pengaturannya Dinas Pariwisata dalam pelaksanaanya melakukan 1) Peran pengaturan sebagai koordinator, 2) Peran pengaturan sebagai fasilitator, 3) peran pengaturan sebagai stimulator. Dalam Peran Pelayanan Dinas Pariwisata melakukan pengembangan kawasan objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono yang dapat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi dan bagi peningkatan taraf hidup serta mampu meningkatkan kesempatan kerja. Dalam Peran Pemberdayaan Dinas Pariwisata Sudah melakukan perencanaan dan pelatihan kerja, perencanaan dan pelatihan kerja dengan masyarakat yang ada di Desa sekitar wilayah wisata.

¹ SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sisial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adapun saran yang bisa di paparkan dalam penelitian ini adalah Dalam Peran Pengaturan Dinas Pariwisata harus melakukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah seperti Dinas Perkerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Kepolisian, sehingga dalam pengembangan Kawasan Wisata Canting Mas Puncak Dipowono terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam peranan Pemberdayaan Dinas Pariwisata mestinya mendayagunakan masyarakat setempat untuk membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan pariwisata yang asri dan Dinas Pariwisata juga melakukan penambahan sumber daya manusia terutama dalam pelatihan dan pengembangan berbahasa Inggris. Dalam Peran Pelayanannya Dinas Pariwisata harus meningkatkan penjaminan keamanan serta membangun Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan seperti penyediaan sarana toilet umum, tempat parkir dan mushola serta mempertahankan kealamian, keasrian kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono, baik dari adat, kehidupan masyarakat, seni dan budaya, serta lingkungan.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Pariwisata

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan keindahan alam yang sangat menarik untuk dikembangkan. Keragaman budaya ini dilatarbelakangi oleh adanya agama, adat istiadat yang unik dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Potensi tersebut merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan kepariwisataan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang besar serta memberikan modal besar bagi sektor pariwisata. Parawisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Dengan potensi wisata alam dan budaya yang begitu besar, pariwisata Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar bagi perekonomian Indonesia² Dalam Undang – Undang

² <http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/pariwisata>

diakses pada tanggal 8 oktober 2017, pukul 19.25 WIB.

Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa maksud dari kepariwisataan ialah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai – nilai agama budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, sedangkan tujuan dari kepariwisataan ialah pemabangunan kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.³ Dimana Perkembangan yang terjadi saat ini, pada dunia kepariwisataan menunjukkan *trend* yang positif sehingga menimbulkan rasa optimis yang dalam bagi mereka yang bergerak disektor pariwisata dengan ditunjang oleh perkembangan teknologi yang modern dibidang komunikasi dan transportasi.

Berdasarkan jumlah pengunjung menurut data dari Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sido Akur / Pengelola Objek Wisata Canting Mas Puncak Dipowono Desa Clapar, Kec. Kokap, Kab.

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisata

Kulon Progo. Pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan, jumlah Wisatawan yang berkunjung pada tahun 2015 berjumlah 2.394 jiwa kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 berjumlah 2.010 jiwa dan pada akhir tahun 2017 terjadi penurunan kembali dengan jumlah 970 jiwa. Permasalahan yang terjadi di objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono mulai dari tahun 2016 – 2017 mengalami fase penurunan kunjungan wisata, dengan terkendala Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan. Minimnya antusias warga lokal untuk bekerja di objek wisata tersebut, sehingga menjadi kurang optimal dalam aktifitas pengelolaan objek wisata, Kemudian tidak didukung oleh infrastruktur salah satunya akses jalan menuju lokasi. Dimana dalam kepariwisataan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor untuk menunjang infrastruktur, promosi dan konektifitas. Dalam hal ini yang memiliki tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pemasaran di bidang wisata adalah Dinas Pariwisata. Yang dimana peneliti ingin melihat bagaimana peran dari dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten kulon Progo.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah terdiri dari :
Bagaimana peran Dinas Pariwisata terhadap pengembangan dari potensi Canting Mas Puncak Dipowono yang ada di Kabupaten Kulon Progo ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Sebuah penelitian akan tetap berada pada arah koridor penelitian yang benar dengan mengacu pada tujuan penelitiannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami *central phenomemon* dengan subyek dan lokasi penelitian yang spesifik.⁴ Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Dinas Paiwisata dalam pengembangan Canting Mas Puncak Dipowono.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Kulon

⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi aksara, 2007. Hal:89

Progo dalam pengembangan objek wisata Canting Emas Puncak Dipowono. Oleh karena itu, kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian Ilmu Pemerintah tentang peran dinas pariwisata terhadap pengembangan objek wisata

Manfaat Paraktis

Bagi peneliti

1. Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama mendalami perkuliahan.
2. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yoyakarta.
3. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kulon Progo.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dan pemicu bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kulon Progo dalam Perannya mengembangkan sektor wisata.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam mengembangkan pengelolaan objek wisata Canting Emas Puncak Dipowono.

KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai kajian analisis mengenai tema-tema dalam penelitian ini. Kajian penelitian menjadi aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian agar dalam penelitian seorang peneliti dapat dengan mudah merumuskan arah penelitian secara mengerucut. Kerangka teori akan menambah referensi dan pemahaman bagi seorang peneliti terhadap topik atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.

Peran Pemerintah

Peranan

Berbicara mengenai peranan, hal ini berkaitan dengan seorang individu, Lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan fungsi utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam kamus bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa peranan bagian tugas utama yang dilaksanakan.⁵ Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Peran atau peranan dapat juga diartikan suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok dengan yang lebih besar dalam suatu peristiwa. Beberapa pengertian peranan diantaranya :

Menurut WJS. Purworaminto.⁶

Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama

(Terjadinya suatu hal atau peristiwa). Sedangkan menurut Astrid S. Susanto.⁷ Peranan adalah meliputi bagian – bagian yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seorang dalam masyarakat, Peranannya dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.⁸

Peran pemerintah

Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dalam mengembangkan pelaksanaan semua tugas – tugasnya disertai dengan penuh rasa

⁵ Tim penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 667.

⁶ WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hal 735

⁷ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, Hal 95.

⁹ Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration And Introduction*, Martin Press, London, 1994, hal 88-11

tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan. Peran pemerintah adalah mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan – kebutuhan para pegawai negeri baik jasmani maupun rohani, atau membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fungsi dasar pemerintah menurut Anerson seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani yaitu :⁹ 1. Menyediakan infrastruktur. 2. Menyediakan barang – barang dan jasa publik. 3. Menyelesaikan konflik – konflik antar kelompok. 4. Menumbuhkan dan memelihara kompetisi. 5. Menjaga kelestarian sumberdaya. 6. Menjaga agar setiap warga Negara memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang dibutuhkan. 7. Menjaga stabilitas ekonomi. Dari beberapa fungsi diatas, paling tidak ada

⁹ Sri Mulyani. *Peran Pemerintah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap*, Fisip UMY, Yogyakarta, 2001, hal 8.

tiga fungsi peran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu :¹⁰

- **Fungsi pengaturan (*Regulasi*)**

Merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten / Kota. Fungsi *regulasi* atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang – undangan.

Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan oleh lembaga – lembaga pemerintah baik lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif juga lembaga Departemen maupun non. Departemen. Peraturan – peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merupakan

¹⁰ Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration And Introduction*, Martin Press, London, 1994, hal 88-11

hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen – komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

- **Fungsi Pemberdayaan (*Empoworment*)**

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan sebagiannya. Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diperdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum ekonomi, dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah bisa memperdayakan masyarakat, karena

upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari aspek imitasi keteladanan dari aparat pemerintah sendiri.

- **Fungsi Pelayanan**

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan – kebijakan yang ditetapkan, baik dari birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah. Fungsi pelayanan merupakan peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu : 1. Menjamin keamanan Negara. 2. Memelihara ketertiban. 3. Menjamin penerapan keadilan. 4. Pekerjaan umum dan pelayanan. 5. Meningkatkan kesejahteraan social. 6. Menerapkan kebijakan ekonomi. 7. Memelihara sumber daya lingkungan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah adalah sebagai satu

lembaga yang dibentuk oleh Negara. Yang mempunyai peran tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tugas – tugas tersebut baik berupa penyedia sarana dan prasarana, barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan di daerah yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu dengan fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual adalah salah satu dari unsur penelitian penting dan dapat dipahami bahwa definisi konseptual merupakan tahapan penting yang membahas mengenai pembatasan pengertian konsep dengan lain yang merupakan suatu abstraksi hal – hal yang diminati agar tidak terjadi kesalahpahaman, adapun definisi konseptual yang digunakan yaitu :

Peran

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

Pemerintah daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dinas pariwisata

Dinas pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan pengembangan pariwisata dan pemasaran wisata. Dinas pariwisata di pimpin oleh

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi soaial, budaya, alam dan ilmu.

Wisata alam

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada budidaya, sehingga memungkinkan wisatwan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi opsional merupakan penjabaran dari suatu variable dalam indikator – indicator atau gejala-gejala yang terperinci, sehingga variable-variabel itu dapat diketahui iukurannya. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasioanl yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.¹¹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah peran pemerintah yang meliputi:

Peran pengaturan

Memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis dan mengatur kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan

¹¹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1995, hal 21.

motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Peran pemberdayaan

Djalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, sadar diri, dan mampu memilih alternative yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini pemberdaaya kepada masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata.

Peran pelayanan

Dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak memberatkan serta tidak pilih kasih dan semua orang memiliki hak sama yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya dalam hal ini pelayanan terhadap wisatawan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam katagori penelitian dengan jenis deskritif kualitatif. Jensi penelitian deskritif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskritif (penggambaran) yang berupa fakta – fakta tertulis maupun lisan dari setiap prilaku orang – orang yang di cermati. Penelitian deskritif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2000: 24). Meneurut Jalaludin Rakhmat (2000: 25), Penelitian deskritif bertujuan sebagai berikut :

1. Memngumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.
3. Membantu perbandingan atau evaluasi

4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan kepengurusan pada waktu yang akan datang.
5. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk menggambarkan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata.

Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo, yang beralamat di Jl. Sugiman No.12, pengasih wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono yang beralamat Jl. Clereng Tamanan KM.6, Desa Hargowilis, Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yaitu dengan Kepala Bidang Pariwisata, pihak swasta dan masyarakat Desa Hargowilis, Kokap Kabupaten Kulonprogo yang akan diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan dan jawaban-jawaban narasumber dicatat ataupun direkam dengan alat perekam.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada berupa laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen

pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa Kualitatif. Secara umum, kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi.
- b) Mengedit data, peneliti memperbaiki kualitas data, seperti hasil wawancara dengan narasumber yang belum tersusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan akan kebenaran yang mungkin timbul setelah membaca data tersebut.

- c) Mengolah data merupakan suatu tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini, data diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan berupa kebenaran-kebenaran terkait dengan penerapan tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon progo kepada masyarakat Desa Hargowilis.¹²

¹²Wardiyanto, Metode Penelitian Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta. Tahun 2006, Hal 38.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan peneliti langsung terjun pada Obyek Wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten Kulon Progo. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo dalam Pengembangan Potensi Obyek Wisata Canting Mas Puncak Dipowono dalam hal ini akan menjabarkan hasil penelitian tentang bagaimana peran pengaturan dinas pariwisata dan bagaimana peran pemberdaanya dinas pariwisata serta bagaimana peran pelayanan yang dilakukan oleh dinas pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

Peran Pengaturan

Peran dinas pariwisata dalam mengembangka potensi objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tiga indicator yakni 1) Peran pengaturan sebagai koordinator, 2) Peran pengaturan sebagai fasilitator, 3) peran pengaturan sebagai stimulator. Agar lebih jelas akan di jabarkan di bawah ini sebagai berikut :

1. Peran Pengaturan Dinas Pariwisata Sebagai Koordinator

Peran dinas pariwisata sebagai Koordinator yang dimaksud adalah mengatur dan membuat konsep dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengembangkan objek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata. Dinas pariwisata Kabupaten Kulon Progo terus berusaha tentang mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan, namun sejauh ini dinas pariwisata Kabupaten Kulon Progo belum secara maksimal melakukan promosi dan pemasaran wisata Canting Mas Puncak Dipowono tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo sejauh ini sudah mensupport keberadaan objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono tersebut dengan berbagai tindakan atau prilaku yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo khususnya

bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo.

2. Peran Pengaturan Dinas Pariwisata sebagai Fasilitator

Kemudian peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo) sebagai fasilitator, disini dinas pariwisata berperan untuk mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas dalam pengembangan objek wisata. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri dalam penyediaan sarana dan prasarana belum di dukung dengan berbagai penginapan, rumah makan, serta transportasi yang memadai. Padahal sarana, prasarana dan infrastruktur adalah salah satu bergerak tidaknya semua sector perekonomian termasuk sector pariwisata. Dinas pariwisata Kabupaten Kulon Progo terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono. dalam hal fasilitas tidak ada fasilitas yang baru dari Pemerintah Daerah maupun Dinas Pariwisata Kabupaten

Kulon Progo untuk sementara fasilitas yang ada pada Objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono diantaranya adalah area parkir kendaraan, tempat istirahat yang memadai.

Dalam upaya pengembangan pelayanan untuk mendukung potensi wisata alam sekumpulan orang yang membentuk Kelompok Hutan Kemasyarakatan Sido Akur ini bekerja sama dengan penduduk sekitar daerah untuk mengelolah tempat wisata ini. Kedepanya memiliki rencana melengkapi fasilitas puncak dipowono dengan berbagai wahana menegangkan seperti flying fox dan beberapa tempat autboon lainnya.

3. Peran Pengaturan Dinas Pariwisata sebagai Stimulator

Selanjutnya yang ketiga peran pemerintah daerah sebagai stimulator, peran pengaturan yang dimaksudkan disini adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya tarik wisata. Dinas pariwisata Kabupaten

Kulon Progo harus menciptakan daya tarik wisata dan harus menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat serta pengelola tempat wisata. Dalam hal stimulator sejauh ini pemerintah Dinas Pariwisata sudah melatih dan memberikan pemberdayaan kepada salah seorang warga di desa tersebut untuk memahami dan menjadi pemandu untuk meningkatkan pariwisata Canting Mas Puncak Dipowono.

Peran Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dari pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan sebagiannya. Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diperdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum ekonomi, dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah bisa memperdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari aspek imitasi keteladanan dari aparat pemerintah sendiri. Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo sudah melakukan pemberdayaan serta pengembangan secara maksimal terhadap objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono beserta masyarakat dan pengelolanya. Karena sejatinya kehadiran pemerintah sudah menjadi kewajiban baginya untuk memajukan objek wisata dan lingkungan sekitarnya.

Dan sejauh ini pemerintah Dinas Pariwisata sudah melatih dan memberikan pemberdayaan kepada salah seorang warga di desa tersebut untuk memahami dan menjadi pemandu untuk meningkatkan pariwisata Canting Mas Puncak

Dipowono. Dalam hal ini peneliti melihat seharusnya pemerintah tidak hanya memeberikan pemberdayaan kepada salah satu warga saja, melainkan memberikan pemeberdayaan langsung kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat paham mengenai obyek wisata tidak hanya itu pemerintah juga lebih meningkatkan pemberdayaannya.

Peran Pelayanan

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan – kebijakan yang ditetapkan, baik dari birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah. Fungsi pelayanan merupakan peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu : Menjamin keamanan, Memelihara ketertiban, Menjamin penerapan keadilan, Pekerjaan umum dan pelayanan, Meningkatkan

kesejahteraan sosial, Menerapkan kebijakan ekonomi, Memelihara sumber daya lingkungan.

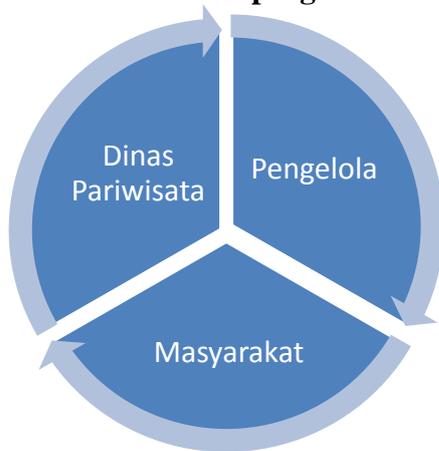
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah adalah sebagai sautu lembaga yang dibentuk oleh Negara. Yang mempunyai peran tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tugas – tugas tersebut baik berupa penyedia sarana dan prasarana, barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan didaerah yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu dengan fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

Salah satu peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik adalah dengan cara meningkatkan pelayanan, fasilitas penunjang maupun sarana pariwisata yang memadai. Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam

meningkatkan kepuasan wisatawan, maka peneliti menguraikannya dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. *Faktor Pelayanan (Service)*
2. *Faktor Keamanan (Safety)*

Gambar. Bagan Kordinasi obyek wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten Kulonprogo



Sumber : *Data Primer diolah. 2018*

a. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata :

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata Kulon Progo yang unik, nyaman, menarik, dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong

percepatan pembangunan wilayah setempat.

- 2) Mengembangkan pemasaran pariwisata Kulon Progo yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kulon Progo.
 - 3) Mengembangkan industri pariwisata di Kulon progo yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosila budaya.
 - 4) Mengembangkan kelembagaan pariwisata organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataan Kulon Progo yang berkelanjutan.
- b. Tugas dan Fungsi Pengelola Wisata & Masyarakat*

1) Ikut

mengembangkan destinasi pariwisata bersama Dinas Pariwisata Kulon Progo yang unik, nyaman, menarik, dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat.

2) Ikut

mengembangkan pemasaran pariwisata Kulon Progo Bersama Dinas Pariwisata yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kulon Progo.

3) Ikut mengembangkan industry pariwisata di Kulon progo bersama Dinas Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosila budaya.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian lapangan tentang peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten Kulon Progo maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Peran Pengaturan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaannya melakukan 1) Peran pengaturan sebagai koordinator, 2) Peran pengaturan sebagai fasilitator, 3) peran pengaturan sebagai stimulator. Yang paling penting Dinas Pariwisata ikut mempromosikan wisata Canting Mas Puncak Dipowono antara lain melalui media cetak dan elektronik dan yang menunjukkan hasil positif adalah kegiatan promosi ke luar daerah Kabupaten Kulon Progo, yang paling penting adalah mempromosikan melalui media-media.

2. Dalam Peran Pelayanan Dinas Pariwisata melakukan mengembangkan kawasan objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono yang dapat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi dan bagi peningkatan taraf hidup serta mampu meningkatkan kesempatan kerja, Dinas Pariwisata menjamin keamanan serta membangun Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan seperti penyediaan sarana toilet umum, tempat parkir dan mushola.
3. Dalam Peran Pemberdayaan Dinas Pariwisata Sudah melakukan perencanaan dan pelatihan kerja, perencanaan dan pelatihan kerja dengan masyarakat yang ada di Desa sekitar wilayah wisata. Dinas Pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat desa, serta membina masyarakat agar dapat memiliki ciri khas dan memelihara keasrian kawasan wisata dan memperkenalkan produk buatan tangan masyarakat Desa Wisata itu sendiri.
4. Faktor penghambat dari pengembangan kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono ini adalah, anggaran dana yang terkadang belum mencukupi upaya pengelola dan masyarakat untuk melakukan kegiatan secara langsung, serta kordinasi dan komunikasi antara pihak pengelola dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Itu sebabnya kenapa pengembangan pembangunan masih berjalan dan secara bertahap.
5. Faktor pendukung dalam pengembangan kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono. Pertama, harus adanya dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat dan Dinas Pariwisata untuk menjadikan kawasan wisata yang mampu bersaing dengan kawasan wisata lainnya. Kedua, harus adanya kerjasama dalam

membangun infrastruktur dan akomodasi demi berkembangnya kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono.

SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kerja sama serta komunikasi yang intens dengan masyarakat dan pengelola obyek wisata Canting Mas Puncak Dipowono agar destinasi wisata tersebut dapat di kelola dengan baik dan terarah.
2. Dalam Peran Pengaturan Dinas Pariwisata harus melakukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah seperti Dinas Perkerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Kepolisian, sehingga

dalam pengembangan Kawasan Wisata Canting Mas Puncak Dipowono terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

3. Dalam peranan Pemberdayaan Dinas Pariwisata mestinya mendayagunakan masyarakat setempat untuk membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan pariwisata yang asri dan Dinas Pariwisata juga melakukan penambahan sumber daya manusia terutama dalam pelatihan dan pengembangan berbahasa Inggris yang mana mengingat sekarang ini telah banyak wisatawan asing yang datang, mengunjungi Wisata Canting Mas Puncak Dipowono, sehingga nantinya dengan adanya generasi muda yang dapat melanjutkan pengembangan yang belum terlaksana.
4. Pemberdayaan masyarakat dan generasi muda yang telah dikenalkan secara detail mengenai

kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono agar dari generasi muda ini dapat membantu dalam pengembangan Wisata Canting Mas Puncak Dipowono sehingga bertambahnya sumber daya manusia.

5. Dalam Peran Pelayanannya Dinas Pariwisata harus meningkatkan penjaminan keamanan serta membangun Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan seperti penyediaan sarana toilet umum, tempat parkir dan mushola serta mempertahankan kealamian, keasrian kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono, baik dari adat, kehidupan masyarakat, seni dan budaya, serta lingkungan, dengan demikian pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan kebersihan dan meningkatkan keasrian kawasan wisata Canting Mas Puncak Dipowono, agar tidak terkontaminasi dengan budaya

asing, karena akan makin berkembangnya kawasan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid S. Susanto. 1983; *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, Hal 95.
- Dedi Supradi & Dadang Solihin, 2002; *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- G.R, Soekadijo : *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Sistem Linkage)*, PT Gramedia Pustaka Jakarta: hlm 25
- HAW Widjaja. 2013; *Penyelenggara Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada: hlm 7
- Inskeep Edward, *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold: New York. Hlm 72.
- Joshep Riwu Kaho, 2011. *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pembangunan SDA Aparatur Pemda dan DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 21
- Kaloh. J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakart. hal 21.
- Owen E. Hughes, 1994; *Public Manajemen And Administration And Introduction*, Martin Press, London, hal 88-11
- Suwantoro, gamal : *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset Yogyakarta: hlm, 23
- Sri Mulyani. 2001; *Peran Pemerintah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap*, Fisip UMY, Yogyakarta, hal 8.
- Tim penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 667.
- Wardiyanto. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal 38.
- WJS. Purwodarminto, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal 735
- Peraturan-Peraturan :
- Undang – Undang Otonomi Daerah 2004.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1947.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 41
- Internet :
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo. 2017
- http://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/vi_ew_detil/6/kondisi-umum (diakses pada tanggal 8 oktober 2017, pukul 19.25 WIB.

<http://www.bkpm.go.id> diakses pada tanggal 8 oktober 2017, pukul 19.25 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id> di akses pada tanggal 29 April 2018 pukul 20.01 WIB

<http://digilib.unila.ac.id> di akses pada tanggal 23 April 2018 pukul 23.35 WIB

<http://digilip.uns.ac.id> di akses pada tanggal 23 April 2018 pukul 23.04 WIB

<https://wisatadunia.net> di akses pada tanggal 13 Juli 2018 Jam 06.26 WIB

www.jvi.ui.ac.id di akses pada tanggal 23 April 2018 pada pukul 23.50 WIB

www.kulonprogo.go.id